

PENGARUH PERAN PEMERINTAH DESA, SIKAP MASYARAKAT, PROSEDUR PENYALURAN PINJAMAN TERHADAP KINERJA UNIT PENGELOLA KEUANGAN

Adi Penawan¹⁾, Tri Nurdyastuti²⁾
STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta
Email: tri.nurdyastuti@stie-aub.ac.id

Abstract

The purpose of this study to know effect of the role of village government, public attitudes and lending procedures to the performance of the Financial Management Unit. The type of this research is survey research conducted at UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe. The population in this study were 222 economic activity groups from 14 participating villages. The sample used in this study amounted to 100 people. Sampling technique is done by Random Sampling The technique of collecting data using questioner and documentation.

The results of this study indicate that: The role of village government has a positive and significant impact on UPK Performance; Public Attitudes significantly influence UPK Performance; Lending Procedure has significant effect to Performance of UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe. R square value of 0.642 means Performance of UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe explained by Role of Village Government, Public Attitude and Procedure of Loaning equal to 64,2% and the rest equal to 35,8% explained other variable outside research model.

Keywords: role of village government, community attitude, lending procedure, performance performance of the Financial Management Unit

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran pemerintah desa, sikap masyarakat dan prosedur pemberian pinjaman terhadap kinerja Unit Pengelola Keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey yang dilakukan pada UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe. Populasi dalam penelitian ini adalah 222 kelompok kegiatan ekonomi dari 14 desa yang berpartisipasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Random Sampling* Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Peran Pemerintah Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UPK; Sikap Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UPK; Prosedur Pemberian Pinjaman berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe. Dari perhitungan nilai *R square* sebesar 0,642 artinya Kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe dijelaskan oleh Peran Pemerintah Desa, Sikap Masyarakat dan Prosedur pemberian Pinjaman sebesar 64,2% dan sisanya sebesar 35,8% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: peran pemerintah desa, sikap masyarakat, prosedur pemberian pinjaman, kinerja Unit Pengelola Keuangan.

A. Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir, bathin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembangunan merupakan suatu proses yang dinamis dan multidimensional untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat yang lebih tinggi, mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial dan institusi-institusi nasional dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000). Dalam mensejahterakan masyarakat, permasalahan kemiskinan merupakan persoalan

yang perlu dipecahkan. Perkembangan pembangunan antara kabupaten/ kota, desa dan kota yang tidak seimbang akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh terjadi ketimpangan sebagai akibat dari kurang tersedianya sumber daya alam, sumber daya manusia dan keuangan. Kondisi ini tercermin antara lain adanya perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara kabupaten/kota. Disamping itu pertumbuhan ekonomi selama ini relatif cukup tinggi namun distribusinya tidak merata berdampak pada kesenjangan antara kabupaten/kota dan kesenjangan antara kelompok pendapatan masyarakat. Pembangunan daerah pada bidang ekonomi dititikberatkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Pembangunan yang paling utama bagi daerah adalah penciptaan lapangan kerja (Syaukani dkk, 2003). Keberhasilan sebuah pemerintahan salah satunya dilihat dari seberapa jauh pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Penciptaan lapangan kerja yang tinggi akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Langkah yang ditempuh pemerintah baik bersifat nasional maupun regional salah satunya yaitu melaksanakan berbagai program berbasis penanggulangan kemiskinan. Sampai saat ini, telah banyak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan baik yang bersifat nasional maupun daerah. Mulai dari kegiatan penciptaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan program pendidikan dan keterampilan, sampai dengan pelaksanaan program-program seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan lain lain. Usaha-usaha tersebut didorong untuk menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) adalah program nasional yang menjadi kerangka dasar dan acuan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan Umum PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan mendorong kemandirian dalam

pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberi bantuan dana bergulir yang akan digunakan masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka. (Raisa Betsaida Hutabarat, 2016)

Dalam kegiatan ekonomi diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana BKM/UPK berada, dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pinjaman bergulir sepenuhnya diserahkan pada warga masyarakat setempat. Dengan tujuan menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Dalam praktek ini masyarakat diberikan stimulant dana yang dinamakan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Harapan melalui pembelajaran ini adalah masyarakat secara bertahap belajar menumbuh kembangkan keberdayaan dalam tiga aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi agar mandiri dalam menanggulangi persoalan kemiskinan dan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) serta pencapaian MDGs (*Millenium Development Goals*).

Dana BLM (bantuan Langsung Masyarakat) pada dasarnya adalah wakaf tunai yang di dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan oleh masyarakat di bawah koordinasi BKM. BKM sebagai penerima dana BLM harus dapat menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya telah digunakan secara benar dan dipertanggungjawabkan secara terbuka dan benar juga. Untuk itu BKM harus dapat mengelola dana tersebut secara benar, transparan dan akuntabel. Pembukuan, merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja pengelolaan dana/keuangan BKM. Dengan demikian semua transaksi keuangan harus dicatat dengan benar agar dapat disusun suatu Laporan Keuangan Bulanan

Struktur kelembagaan PNPM mencakup seluruh pihak yang bertanggung jawab dan terkait dalam

pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik dipusat maupun daerah. Unit Pengelolaan Kegiatan atau yang biasa disingkat dengan UPK merupakan sebuah unit dari PNPM Mandiri yang dibentuk oleh musyawarah masyarakat kelurahan di sebuah kecamatan. Peran UPK adalah sebagai unit pengelolaan dan operasi terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. UPK merupakan organisasi yang bekerja lintas kelurahan yang salah satu tugasnya adalah pengelolaan dana bergulir. Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang dibentuk Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan fungsi sebagai pengelola dana bergulir dan memberdayakan masyarakat lokasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. UPK Kalijambe terbentuk pada tahun 2003, dalam perjalanannya sampai saat ini UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe memiliki Kelompok SPP sebanyak 155 dan kelompok UEP sebanyak 67 total kelompok 222 kelompok kegiatan ekonomi dari 14 desa yang berpartisipasi. UPK memiliki asset ekonomi berupa dana segar-piutang dan berupa inventaris sebesar Rp. 4.101.453.395,-.

UPK kalijambe hadir dengan semangat yang berbeda dengan lembaga perkreditan yang selama ini beredar di masyarakat. UPK langsung menuju pada kelompok yang selama ini tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (bank). UPK Kalijambe masuk di desa dan langsung bersaing dengan lembaga pelepas uang (*rentener atau bank plecit/harian*) yaitu rumah tangga miskin. UPK Kalijambe masuk pada kelompok sasaran yang selama ini belum terlayani oleh akses permodalan dari pemerintah. Ini merupakan tantangan yang pertama di hadapi dan tidak mudah untuk lulus.

Beberapa penelitian pernah dilakukan yang berkaitan dengan kinerja PNPM. Tety Elida dan Beny Susanti (2009), Penelitian yang dilakukan di Pacoran Mas-Depok, BKM Bina Budi Mulya memiliki kinerja keuangan yang minimum. Jumlah tunggakan yang cukup besar menjadi faktor penyebab minimumnya kinerja BKM

tersebut. Kinerja yang minimum ini diperlihatkan setelah 2 tahun proses perguliran dana. Selain tanggung jawab yang masih rendah di kalangan KSM, hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya, yaitu adanya berbagai program bantuan pemerintah diantaranya Jaringan Pengamanan Sosial (JPS). Program JPS yang sebelumnya digulirkan kepada masyarakat setempat, diterjemahkan sebagai program bantuan cuma-cuma dari pemerintah, sehingga masyarakat merasa tidak mempunyai kewajiban mengembalikan sejumlah bantuan yang mereka terima. Hal yang sama kemudian diterjemahkan oleh sebagian masyarakat terhadap perguliran dana yang dilakukan melalui program P2KP.

Aini Fitri, 2016, Evaluasi Kinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun 2013-2015, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan UPK PNPM-MPd Kecamatan Negara dalam kondisi sehat, hal ini ditunjukkan dengan hasil tahun 2013 sebesar 93,75%, tahun 2014 sebesar 93,75% dan tahun 2015 sebesar 93,75%. Maka dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan UPK PNPM-MPd di kecamatan Negara sudah berjalan dengan efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). peran pemerintah desa terhadap kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe; 2). sikap masyarakat terhadap kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe; 3). prosedur pemberian pinjaman berpengaruh terhadap kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey yang dilakukan pada UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe. Populasi dalam penelitian ini adalah 222 kelompok kegiatan ekonomi dari 14 desa yang berpartisipasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Fraenkel dan Wallen dalam Widayat (2004:105) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal adalah sebanyak 100 orang maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Random Sampling*. *Random sampling* disebut juga dengan pengambilan sampel secara acak, yaitu pengambilan sampel tanpa pilih / tanpa

pandang bulu yang didasarkan atas prinsip matematis yang telah teruji dalam praktek. Teknik ini dipandang sebagai teknik sampling paling baik dalam penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan kuesioner dan data-data dari UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen penelitian berupa uji validitas dengan metode *one shot method* dan uji reliabilitas diukur dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. Uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan model Regresi Linear Berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja UPK (PAR)

β_0 = Konstanta

ε = Faktor Error

X_1 = Peran Pemerintah Desa

X_2 = Sikap Masyarakat

X_3 = Prosedur Penyaluran Pinjaman

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Pengujian Instrumen Penelitian dan Asumsi Klasik

Tabel 1. Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian	Uji	Alat	Variabel	Status
Instrumen Penelitian	Validitas	<i>One shot methods</i>	Peran	Valid
			Pemerintah Desa	Valid
			Sikap Masyarakat	Valid
			Prosedur Penyaluran Pinjaman	Valid
			Kinerja UPK	Valid
	Reliabilitas	<i>Cronbach Alpha</i>	Peran	Reliabel
			Pemerintah Desa	Reliabel
			Sikap Masyarakat	Reliabel
			Prosedur	Reliabel
				Reliabel

Penyaluran
Pinjaman
Kinerja
UPK

Sumber: Hasil olah data, 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui hasil uji instrumen variabel menunjukkan semua variabel valid dan reliabel.

b. Uji Asumsi Klasik

1). Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*.

Berdasarkan hasil perhitungan uji *Kolmogorov Smirnov* dapat diketahui bahwa nilai *p-value* berturut-turut dari Peran Pemerintah Desa, Sikap Masyarakat, Prosedur Penyaluran Pinjaman dan Kinerja UPK adalah sebesar 0,108; 0,195; 0,206 dan 0,066. Nilai *p-value* dari semua variabel lebih besar dari α ($p > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan responden tentang semua variabel memiliki sebaran data yang normal.

2). Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas mempunyai varian kesalahan pengganggu yang sama dalam model regresi. Uji ini akan dilakukan dengan grafik scatter plot.

Dari hasil pengujian grafik scatterplots terlihat titik-titik menyebar secara acak (random) baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3). Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya ada suatu hubungan yang sempurna antara beberapa variabel bebas dalam model regresi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apabila dalam model terdapat korelasi sempurna diantara masing-masing variabel bebasnya. Variabel yang tidak menyebabkan multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang lebih kecil dari 10. Selain itu juga dapat dilihat tidak terjadi multikolinieritas jika $R^2 < 0,9$. Dari hasil analisis koefisien determinasi didapat bahwa nilai $R^2 < 0,9$.

Dari hasil pengujian, nampak bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas

karena nilai VIF < 10 dan Toleransi > 0,1.

c. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien	t	Signifikan
Konstanta	8,776		
Peran Pemerintah Desa →	0,222	3,43	0,001
Kinerja Masyarakat →	0,133	2	0,041
Sikap Masyarakat →	0,382	2,07	0,041
Kinerja Masyarakat →		5	0,001
Prosedur Penyaluran Pinjaman →		6,84	0,000
Pinjaman Kinerja →		9	0,000
F test		57,3	0,000
		94	0,000
<i>R square</i>	0,642		

Sumber: Hasil olah data, 2018

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan didapatkan persamaan rumus analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression analysis*) adalah sebagai berikut :

$$Y = 8,776 + 0,222 X_1 + 0,133 X_2 + 0,382 X_3 + e$$

(0,000)**(0,001)** (0,041)** (0,000)**

d. Uji t

Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah Desa terhadap Kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe.

Hasil menunjukkan Peran Pemerintah Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UPK. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,001 < 0,05.

Peran Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe. (**hipotesis terbukti**)

b. Variabel Sikap Masyarakat terhadap Kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe.

Hasil menunjukkan Sikap Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UPK. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,041 < 0,05.

Sikap Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe. (**hipotesis terbukti**).

c. Variabel Prosedur Penyaluran Pinjaman terhadap Kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe.

Hasil menunjukkan Prosedur Pemberian Pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UPK. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05.

Prosedur Pemberian Pinjaman berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UPK PNPM-MPd

Kecamatan Kalijambe. (**hipotesis terbukti**).

e. Uji F

Berdasarkan hasil uji secara serempak (Uji F) diketahui besarnya nilai F sebesar 57,394 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa, Sikap Masyarakat dan Prosedur Penyaluran Pinjaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe.

f. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *R square* sebesar 0,642 artinya Kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe dijelaskan oleh Peran Pemerintah Desa, Sikap Masyarakat dan Prosedur Penyaluran Pinjaman sebesar 64,2% dan sisanya sebesar 35,8% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian.

2. Pembahasan

a. Peran Pemerintah Desa terhadap Kinerja UPK.

Peran Pemerintah Desa berpengaruh signifikan dalam peningkatan Kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe. Oleh karena itu peran pemerintah desa perlu ditingkatkan guna menunjang peningkatan kinerja dari UPK yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemerintah desa diharapkan tidak melakukan intervensi terhadap program yang dijalankan oleh UPK.
2. Aparat desa seyogyanya bisa memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan program yang ada di UPK.
3. Pemerintah desa juga berperan serta membantu dalam penanganan masalah yang dialami dalam pelaksanaan program di UPK.

b. Sikap Masyarakat terhadap Kinerja UPK.

Sikap Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila sikap masyarakat baik maka kinerja UPK juga akan meningkat. Oleh karena itu sikap masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dengan cara:

1. UPK dalam memberikan bantuan agar dapat diberikan untuk kegiatan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara luas.
2. Program-program yang diajukan oleh masyarakat sendiri hendaknya tidak saja bermanfaat bagi kelompok atau pribadi namun dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

c. Prosedur Penyaluran Pinjaman terhadap

Kinerja UPK.

Prosedur Pemberian Pinjaman berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UPK PNPM-MPd Kecamatan Kalijambe. Untuk itu, prosedur pemberian pinjaman dapat lebih ditingkatkan lagi agar kinerja UPK lebih meningkat dengan cara:

1. Pinjaman yang digunakan lebih diutamakan untuk modal kerja dan bukan untuk kegiatan konsumtif.
2. Pihak UPK harus lebih selektif tentang pendapatan dan kemampuan mengembalikan pinjaman dari anggota, ini merupakan salah satu faktor penilaian.

D. Simpulan dan Kontribusi Praktis

1. Simpulan

a. Prosedur penyaluran pinjaman merupakan variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja UPK. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja UPK dari sisi prosedur penyaluran pinjaman harus lebih diutamakan.

b. Variabel peran pemerintah desa dan sikap masyarakat terlihat juga memberikan kontribusi yang positif dan signifikan dalam peningkatan kinerja UPK, maka hal ini juga harus menjadi perhatian dari pihak UPK agar kinerjanya semakin meningkat.

2. Kontribusi Praktis

Meningkatkan kinerja UPK dalam mengelola dana lebih efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel sehingga dapat membantu masyarakat kelurahan/desa khususnya dalam menanggulangi kemiskinan.

E. Daftar Pustaka

Aini Fitri. 2016. Evaluasi Kinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun 2013-2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi. Vol: 8 Nomor 3 Tahun 2016*

Azwar, S. 2005. *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Eddie Rinaldy. 2009. *Membaca Neraca Bank*, Jakarta :Indonesia Legal Center Publishing.

Elida, Tety dan Susanti, Beny. 2009. Efektivitas Program Bantuan Dana Bergulir P2kp (Studi Kasus pada Kelurahan Pancoran Mas-depok, Jawa Barat). *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 3, Volume 14, Desember 2009*

Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi. Aksara.

Kusnardi, Moch. dan Saragih, R. Bintan, 2008, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

M. Nafarin. 2009. *Penganggaran Perusahaan*. Penerbit Salemba 4. Jakarta.

Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Notoatmodjo. 2005. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Raisa B. H. 2016. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMd) Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016*.

Rivai, Veithzal, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori Ke Praktik*, Edisi Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syaukani, H, dkk. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.

Widayat, 2004, *Metode Penelitian Pemasaran*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit, CV. Cahaya Press, Malang.

Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.